

**SISTEM PENGKADERAN ORGANISASI
MUHAMMADIYAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ELIZA SAFITRI

NIM. 170302009

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Agama-Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**SISTEM PENGKADERAN ORGANISASI
MUHAMMADIYAH DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Program Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh :

ELIZA SAFITRI

NIM. 170302009

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Agama-Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II



Dra. Surarva, IT. M.A., Ph.D
NIP. 195302051985102001



Nofal Liata, M.Si
NIP. 198410282019031004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Studi Agama-Agama

Pada hari / Tanggal : Kamis, 6 Januari 2022 M
Kamis, 4 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,



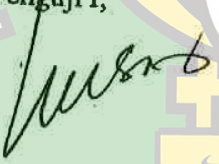
Dra. Suraiya, IT. M.A., Ph.D
NIP. 195302051985102001

Sekretaris,



Nofal Liata, M.Si
NIP. 198410282019031004

Penguji I,



Dr. Husna Amin, M. Hum
NIP. 196312261994022001

Penguji II,



Dr. Muhammad, S.Th.I., MA
NIDN. 2127037701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Eliza Safitri

NIM : 170302009

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Program Studi Agama – Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Sistem Pengkaderan Organisasi Muhammadiyah Di Kota Banda Aceh”, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 6 Januari 2022
Yang menyatakan,



ELIZA SAFITRI
NIM. 170302009

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama/ NIM : Eliza Safitri/170302009
Judul Skripsi : Sistem Pengkaderan Organisasi Muhammadiyah
Di Kota Banda Aceh
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Prodi : Studi Agama – Agama
Pembimbing I : Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D
Pembimbing II : Nofal Liata, M. Si

Pengkaderan Muhammadiyah merupakan upaya mempersiapkan generasi penerus Muhammadiyah sebagai kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa dan merupakan unsur penting dan strategis dalam memelihara serta melangsungkan keberadaan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh dan faktor pendukung serta penghambat pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah Sistem pengkaderan memiliki arah dan tujuan yang jelas dan memiliki pedoman-pedoman pokok yang dibuat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan seterusnya. Tujuan Pengkaderan Muhammadiyah adalah untuk menciptakan kader, karena kader adalah penerus suatu organisasi atau persyarikatan dimasa yang akan datang. Adapun faktor pendukung serta penghambat pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh yaitu (a) Sejarah Muhammadiyah; (b) Dukungan dari demisioner dan Lembaga Institusi lainnya; (c) Adanya kepercayaan dari Pimpinan. Adapun Faktor Penghambat sistem pengkaderan Muhammadiyah (a) kurang konsistennya panitia terhadap jobdisk yang menjadi amanahnya; (b) Masih ada pimpinan ataupun kader yang kurang minat dalam bidang keilmuan; (c) Kendala keuangan menjadi hal yang belum terpecahkan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai tugas akhir dengan judul *Sistem Pengkaderan Organisasi Muhammadiyah Di Kota Banda Aceh*. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D selaku pembimbing I, yang dengan segala keikhlasan serta kesabarannya bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, ilmu, dorongan, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses menempuh proses pendidikan pada Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Nofal Liata, M. Si selaku pembimbing II, yang pada kesibukannya juga menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sebaik mungkin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan mencurahkan pemikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan karya tulis ini.

3. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang tiada henti selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungannya.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah keluarga, bapak, ibu dan kawan-kawan berikan. Semoga Allah *subhaanahuwata'aala* membalas semua kebaikan ini. Aamiin.

Banda Aceh, 25 November 2021

جامعة الرانيري

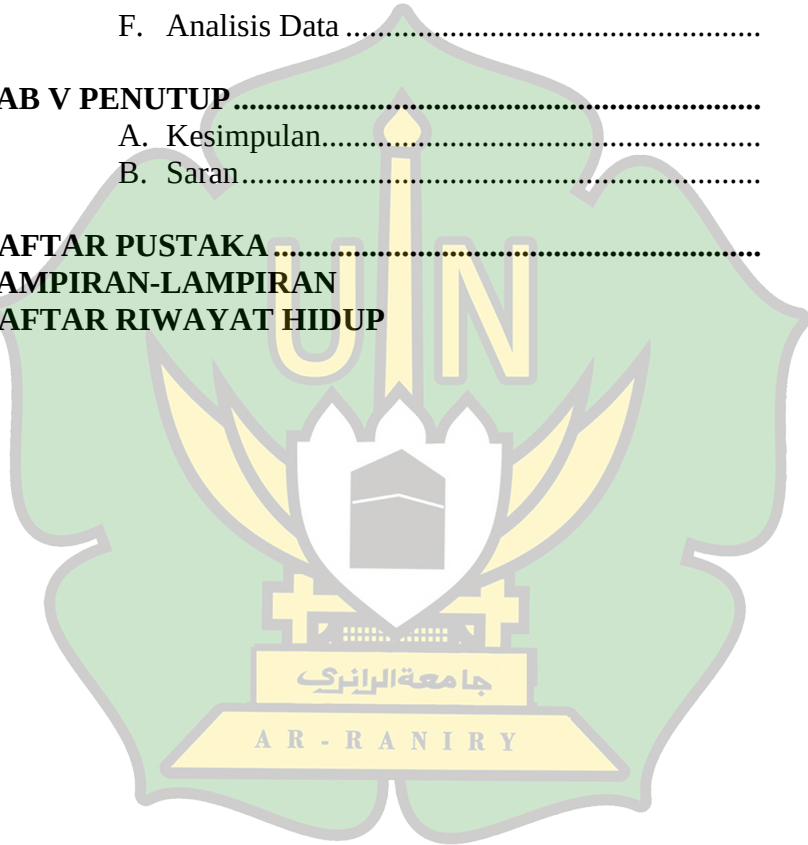
A R - R A N I R Y

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	10
C. Definisi Operasional.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Lokasi Penelitian	14
B. Jenis Penelitian.....	14
C. Informan Penelitian	15
D. Sumber Data.....	16
E. Teknik Pengumpulan Data.....	17
F. Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	22
A. Sejarah berdirinya Muhammadiyah Kota Banda Aceh	22
1. Muhammadiyah di Yogyakarta	22
2. Muhammadiyah di Kota Banda Aceh	23
B. Proram Organisasi Muhammadiyah.....	30
C. Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh	34
1. Tujuan Pengkaderan.....	34
2. Arah Pengkaderan	34

3. Jenis dan Bentuk Pengkaderan	36
4. Penjenjangan Kader.....	41
5. Pengorganisasian Kader	44
D. Pandangan Pengurus Terhadap Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh	44
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh	48
F. Analisis Data	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 2 : Surat Mohon Izin Pengumpulan Data dari Dekan
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian
- Lampiran 4 : Lembar Pedoman Wawancara Pengurus
Muhammadiyah
- Lampiran 5 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Rasulullah Muhammad SAW memulai dakwahnya, beliau dari awal sadar bahwa dakwah membutuhkan kader sebagai penggerakannya, maka beliau mengkader para sahabat untuk siap memikul tanggung jawab menyebarluaskan ajaran Islam. Beliau memulai pengkaderan di rumah salah satu sahabat, yaitu Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah mengkader para sahabat dengan intens, beberapa sahabat mengikuti proses kaderisasi secara sembunyi-sembunyi, meskipun kondisi Kota Mekah saat itu tidak kondusif untuk proses kaderisasi. Dalam rangka kaderisasi dakwah pula, Rasulullah mengirim kader terbaiknya ke Kota Yasrib. Mushab bin Umair adalah kader yang berhasil mengislamkan tokoh-tokoh Kota Yasrib, sehingga kota tersebut siap menerima dan menampung Rasulullah serta para sahabatnya.¹

Kader Muhammadiyah adalah tenaga inti penggerak persyarikatan yang memiliki totalitas jiwa, sikap, pemikiran, wawasan, kepribadian, dan keahlian sebagai pelaku atau subyek dakwah Muhammadiyah di segala lapangan kehidupan. Karena itu, kader Muhammadiyah harus senantiasa teruji dan terdidik dalam keseluruhan dimensi kemanusiaannya itu, sehingga mampu mengemban misi Muhammadiyah kini dan masa mendatang dalam

¹ Syekh Shafiyyurrahman Al Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1997), hlm. 126.

berbagai tantangan zaman.² Fungsi dan posisi kader dalam suatu organisasi sangatlah signifikan, hal tersebut juga berlaku di persyarikatan Muhammadiyah, karena itu, maka dapat dikatakan bahwa kader adalah inti pergerakan organisasi. Di samping itu, kader juga merupakan syarat penting bagi berlangsungnya generasi kepemimpinan.³

Muhammadiyah merupakan organisasi yang telah berdiri cukup lama. Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330. Sampai sekarang Muhammadiyah telah berumur 104 tahun. Pengkaderan Muhammadiyah merupakan kumpulan program yang terstruktur, dalam menyiapkan kader-kader Muhammadiyah sebagai kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa dan merupakan unsur penting dan strategis dalam memelihara serta melangsungkan keberadaan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah *Amar makruf nahimunkar dan tajdid*, bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah guna mencapai tujuannya. Muhammadiyah harus bergerak untuk membangun kemajuan. Dalam gerakannya itu keberadaannya kader-kader yang bermutu dan konsisten memiliki arti penting bagi perserikatan⁴

Gerakan Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam yang tertua dan terbesar di Indonesia. Muhammadiyah telah berusia lebih dari satu abad dan memiliki ribuan amal usaha di berbagai

² M Darson Hamid, M. Yusron Asrofie dkk, *Kader Persyarikatan dalam Persoalan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2002), hlm. 41.

³ MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016). hlm. 34.

⁴ MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016). hlm. 6.

bidang. Amal usaha yang paling banyak adalah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Muhammadiyah berdiri sebagai gerakan pemurnian ajaran Islam dan pemberdayaan serta pemajuan umat Islam, di Indonesia khususnya dan di dunia Islam pada umumnya. Maka Muhammadiyah pun membawa semboyan sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Amal usahanya di bidang pendidikan, berupa sekolah Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern, dimana sekolah model milik Muhammadiyah lahir sebagai sintesa antara pesantren dan sekolah Belanda.

Organisasi Muhammadiyah setelah mapan berdiri di Yogyakarta, Muhammadiyah mulai menyebarkan sayapnya ke luar pulau Jawa. Organisasi Muhammadiyah masuk ke Aceh pada tahun 1923 yang dibawa oleh Djajasoeakarta yaitu seorang karyawan kereta api Belanda yang bertugas di Aceh. Organisasi Muhammadiyah secara resmi berdiri di Aceh pada tahun 1927.⁵ Sistem pengkaderan organisasi Muhammadiyah di Kota Banda Aceh merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas dan memiliki pedoman-pedoman pokok. Dari penerapan sistem pengkaderan ini diharapkan hasil yang cukup maksimal sehingga organisasi Muhammadiyah memiliki generasi penerus dalam memperjuangkan tujuannya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa setiap organisasi harus memiliki sistem pengkaderan agar mempersiapkan generasi penerus di organisasi untuk kelangsungan organisasi. Maka dengan itu peneliti tertarik

⁵ Aslan Nur, dkk, *Jelang Satu Abad Muhammadiyah Aceh...*, hlm. 6.

untuk mengangkat judul tentang penelitian tentang “SISTEM PENGKADERAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH DI KOTA BANDA ACEH”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan penelitian agar pembahasan tidak melenceng dari fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini. Yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pada sistem pengkaderan organisasi Muhammadiyah dan faktor pentingnya penyusunan sistem pengkaderan organisasi Muhammadiyah di Kota Banda Aceh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengkaderan organisasi Muhammadiyah di Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat sistem pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengkaderan organisasi Muhammadiyah di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sistem pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang sistem pengkaderan organisasi Muhammadiyah.
- 2) Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenisnya.
- 3) Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem pengkaderan organisasi Muhammadiyah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi organisasi, penyelenggaraan, pengembangan, atau lembaga-lembaga pendidikan dalam menjawab permasalahan dunia pengkaderan.
- 2) Sebagai umpan balik bagi organisasi dalam sistem pengkaderan.
- 3) Sebagai pertimbangan pihak organisasi dalam mengambil kebijakan tentang penyeleggaran pengkaderan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti, melalui khasanah pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data. Dalam hal ini berkaitan dengan tema yang diteliti, yaitu mengenai Sistem Pengkaderan Organisasi Muhammadiyah Di Kota Banda Aceh.

Pertama dari Ridwan Furqoni dengan judul “*Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Sebagai Sistem Penyiapan Kader Muhammadiyah*”. Dalam temuannya Ridwan menyampaikan bahwa “Konsep tentang sistem pengkaderan diungkap melalui penelaahan terhadap Sistem Pengkaderan Muhammadiyah yang terumuskan dalam buku Sistem Pengkaderan Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah sesungguhnya menganggap penting dan memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kader. Salah satu keseriusannya adalah Muhammadiyah telah menyusun sistem pengkaderan dan secara berkala terus melakukan evaluasi pelaksanaannya.⁶ Penelitian ini berfokus pada pentingnya kader dalam organisasi Muhammadiyah. Sama halnya dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan nantinya yaitu tentang pentingnya

⁶ Ridwan Furqoni, “*Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Sebagai Sistem Penyiapan Kader Muhammadiyah*”, (Tesis Pemikiran Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

sistem pengkaderan dalam organisasi Muhammadiyah di Kota Banda Aceh.

Kedua, dari Tanjung Lihayati dengan Judul Skripsi “*Peran Sekolah Sebagai Media Kaderisasi Muhammadiyah (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta)*”. Dalam temuannya Tanjung menyampaikan bahwa landasan pengkaderan merupakan pijakan pokok atau pondasi yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam proses pengkaderan yaitu Al-Qur’an dan As-sunnah, ideologi Muhammadiyah, keluarga dan masyarakat. Selain itu ia juga menyimpulkan bahwa kontribusi terhadap persyarikatan Muhammadiyah adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik khususnya usia remaja dalam berorganisasi.⁷ Dari temuannya ini sangat jelas bahwa peran sekolah sangat penting dalam memberikan media untuk kepentingan kaderisasi Muhammadiyah dalam perkembangan kegiatan. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan nantinya adalah tentang sistem pengkaderan dalam organisasi Muhammadiyah di Kota Banda Aceh.

Ketiga, dari Mappanyompa dan Imawanto Dengan Judul Jurnal “*Problematika Pengkaderan Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram Dalam Persepektif Norma Pengkaderan Muhammadiyah*” Dalam temuannya Mappanyompa dan Imawanto menyampaikan bahwa Secara utuh kader adalah mereka yang telah tuntas dalam mengikuti seluruh pengkaderan formal, teruji dalam pengkaderan informal dan memiliki bekal melalui pengkaderan non

⁷ Tanjung Lihayati, “*Peran Sekolah Sebagai Media Kaderisasi Muhammadiyah (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta)*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

formal. Keberadaan mereka bukan saja diharapkan dalam eksistensi organisasi tetap terjaga, melainkan juga diharapkan kader tetap akan membawa misi gerakan organisasi hingga paripurna.⁸ Dari temuannya ini sangat jelas bahwa kaderisasi menempati posisi yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan dan gerakan Islam dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu Kaderisasi juga menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari segenap pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan nantinya adalah tentang sistem pengkaderan muhammadiyah sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas dan memiliki pedoman-pedoman pokok.

Keempat, dari Moch. Taufiq Ridho Dengan Judul Jurnal *“Sistem Pengkaderan Berorganisasi Santri (Studi Kasus di Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah)”* Dalam temuannya Taufiq menyampaikan bahwa penyelenggaraan proses kaderisasi di Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen kaderisasi. Sejumlah data yang berkaitan dengan struktur dan mekanisme berorganisasi, program kerja, dan sarana prasarana, bisa dijadikan rujukan argumentasi bahwa manajemen kaderisasi

⁸ Mappanyompa dan Imawanto, *“Problematika Pengkaderan Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram Dalam Persepektif Norma Pengkaderan Muhammadiyah”*, dalam jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No.1,(2019)

telah dilaksanakan pada semua program kaderisasi di pesantren.⁹ Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan pengkaderan berorganisasi santri. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah tentang penyelenggaraan pengkaderan organisasi Muhammadiyah.

Kelima, dari Mardani Dengan Judul Tesis “Manajemen Pendidikan Kader Muhammadiyah Dalam Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 2016/2017)” Dalam temuannya Mardani menyampaikan bahwa implementasi manajemen pendidikan kader Muhammadiyah yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 3 dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta, terhadap pembentukan akhlak siswa yaitu, pendidikan kader Muhammadiyah yang dilakukan di sekolah dengan prinsip manajemen, akan lebih memberikan tingkat keefesienan dan keefektifan dalam pembentukkan akhlak siswa, sehingga terjadi perubahan terhadap siswa setelah mengikuti pendidikan kader, terutama perubahan terhadap akhlak.¹⁰ Penelitian ini hanya berfokus pada pendidikan kader Muhammadiyah dalam pembentukan akhlak siswa. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti lakukan nantinya tentang pengkaderan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah *Amar makruf nahimunkar* dan

⁹ Moch. Taufiq Ridho. “Sistem Pengkaderan Berorganisasi Santri (Studi Kasus di Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah)”, dalam jurnal PP Vol.1, No.2, (2011).

¹⁰ Mardani, “*Manajemen Pendidikan Kader Muhammadiyah Dalam Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 2016/2017)*”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

tajdid, bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah guna mencapai tujuannya.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian tentang organisasi Muhammadiyah. Adapun penelitian ini menggunakan teori organisasi. Menurut Stephen P. Robbins (1994)¹¹ teori organisasi adalah teori yang mengkaji struktur, fungsi dan performansi organisasi beserta perilaku kelompok dan individu didalamnya, dalam mencapai tujuan yang luas dan rumit. Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Sebuah organisasi mempunyai batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Batasan dapat berubah dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu jelas, namun sebuah batasan yang nyata harus ada agar kita dapat membedakan antara anggota dan bukan anggota. Batasan cenderung dicapai melalui perjanjian yang eksplisit maupun implisit antara para anggota dan organisasinya. Pada kebanyakan hubungan kepegawaian, terdapat sebuah perjanjian yang implisit di mana pekerjaan itu ditukar dengan pembayaran upah. Pada organisasi sosial atau suka rela, para anggota memberi kontribusi dengan imbalan prestise, interaksi sosial, atau kepuasan dalam membantu orang lain. Tetapi setiap organisasi mempunyai

¹¹ Robbins, Stephen P.. (1994), Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi / Stephen P. Robbins, Jusuf Udaya (alih bahasa), (ke-3 cet : l.) jakarta : Arcan.

batasan yang membedakan antara siapa yang menjadi bagian dan siapa yang tidak menjadi bagian dari organisasi tersebut.

Berdasarkan teori diatas kaitannya dengan yang ingin peneliti lakukan bahwa, Organisasi itu ada untuk mencapai sesuatu. Sesuatu ini adalah tujuan, dan tujuan tersebut biasanya tidak dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin, hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Tidak perlu semua anggota mendukung tujuan organisasi secara penuh, namun cukup dengan adanya kesepakatan umum mengenai misi organisasi.

C. Definisi Operasional

1. Sistem

Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹²

2. Pengkaderan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengkaderan adalah proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader.¹³ Adapun pengkaderan berasal dari kata kader yang mendapat awal per- dan akhiran -an yang mengandung makna perihalan, yang berhubungan dengan, antara lain, kader. Merujuk pada asal dan makna katanya, kader dalam bahasa Perancis adalah cadre, yang berarti bagian inti tetap dari suatu

¹² <https://jagokata.com/arti-kata/sistem.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 14.00 WIB.

¹³ <https://kbbi.lektur.id/pengkaderan.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 10.32 WIB.

resimen; kelompok elit yang terpilih karena terlatih dengan baik. Sedangkan dalam bahasa latin, kader adalah quadrum, yang berarti empat persegi panjang, bujur sangkar atau kerangka.

3. Organisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) organisasi adalah kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dalam perkumpulan dsb untuk tujuan tertentu serta kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴ Organisasi menurut Everett Rogers adalah suatu sistem individu yang stabil yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama lewat suatu struktur hirarki dan pembagian kerja. Tata hubungan di antara anggota organisasi relatif stabil. Kestabilan susunan organisasi menjadikan organisasi berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁵

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dan kawan-kawan di Yogyakarta, pada 18 Nopember 1912 bertepatan pada 8 Dzulhijjah 1330 H. Tujuan organisasi Muhammadiyah yaitu menegakkan dakwah Islamiyyah

¹⁴ <https://jagokata.com/arti-kata/organisasi.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

¹⁵ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.186.

dalam arti seluas luasnya, bidang usahanya mencakup ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan dakwah.¹⁶

5. Kota

Menurut KBBI Kota daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.¹⁷ Kota merupakan kawasan pemukiman dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu, pemukiman yang ada bersifat tetap dan dihuni oleh masyarakat heterogen. Kota berfungsi sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi wilayah di sekitarnya dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri dan kebudayaan.¹⁸

6. Banda Aceh

Banda Aceh merupakan kota madya dan ibukota dari provinsi Aceh, provinsi paling Utara di Pulau Sumatera, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.¹⁹

¹⁶ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.138

¹⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/kota.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 12.00 WIB.

¹⁸ Jamaluddin, A. N, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hlm. 52-53.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh#cite_note-7

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banda Aceh, kantor ini berada di Jln. Punge Blang Cut II Lr. Penyantun no. 11, Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, tepatnya berada di dalam kompleks Panti Asuhan Punge Blang Cut. Peneliti mengambil tempat penelitian disini karena disini peneliti bisa langsung berjumpa dengan pengurus-pengurus organisasi Muhammadiyah.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Lexi J Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.²⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²¹

Adapun bentuk penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang tanpa mempersoalkan

²⁰ Lexi J Moleoang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 11.

²¹ Lexi J Moleoang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3-4.

hubungan variable penelitian.²² Penelitian deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang.

C. Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²³ Oleh karena itu, seorang peneliti sangat membutuhkan informan, tanpa seorang informan, seorang peneliti akan susah dalam mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.²⁴

²² Nana Sudjana. Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 64

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 67.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 300.

Adapun teknik sampling yang peneliti gunakan disini adalah purposive sampling, karena teknik ini langsung tertuju kepada orang yang dianggap tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, dengan rincian satu orang dari ketua organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, satu orang dari sekretaris Muhammadiyah Kota Banda Aceh dan dua orang dari masyarakat organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari data diperoleh. Untuk memudahkan penggolongan data berdasarkan kebutuhan, maka akan dibagi sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung kelapangan tempat penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁵ Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, serta berkaitan dengan tema penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data diluar kata-kata dan tindakan, sumber data tersebut yakni sumber data tertulis.

²⁵ Lexy J.Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 132.

Sumber data ini dapat diperoleh dari buku, arsip, serta dokumentasi. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.

Mengenai jenis data, dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diteliti, seperti baik, buruk, dan sebagainya. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kata-kata, deskripsi tentang situasi dan kejadian dari obyek penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang diharapkan, maka diperlukan metode-metode yang relevan. Terkait penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera sebagai alat bantu utamanya.²⁶ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengandalkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi juga bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi penelitian kualitatif, data tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi menyaksikan langsung

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 115.

ke lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, yaitu Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara yaitu sebuah dialog atau teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari wawancara.²⁷ Wawancara dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai, dengan cara wawancara mendalam atau disebut *interview mendalam*. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.²⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dokumentasi merupakan catatan penting dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan problematika yang terjadi baik yang bersifat tindakan objek penelitian, pengalaman peneliti, dan kepercayaan masyarakat.

²⁷ Rusdin Pohan, *Metodelogi Penelitian*, (Aceh: Ar-Rigal Institut, 2007), hal. 6.

²⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 151.

Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.²⁹

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.³¹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi"* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2010), hal. 219

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 334

³¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16

memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitan lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang

meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya Organisasi Muhammadiyah

1. Sejarah Muhammadiyah di Yogyakarta

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan . Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air. Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-

anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

2. Sejarah Muhammadiyah di Kota Banda Aceh

Perkembangan Muhammadiyah Kota Banda Aceh dimulai sejak tahun 1923, yaitu berselang 11 tahun dari didirikan oleh pimpinan pusat yaitu KH Ahmad Dahlan yang berpusat di Kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi pembaruan dalam Islam, Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta tepatnya di Kampung Kauman. Setelah berdiri di Yogyakarta Muhammadiyah mulai menyebarkan sayapnya ke daerah-daerah lain. Muhammadiyah sempat mengalami kemunduran dalam hal penyebarannya dikarenakan gangguan dari pihak Kolonialis Belanda menyerang kembali Indonesia.³²

Muhammadiyah adalah organisasi yang mulanya hanya di pulau Jawa akan tetapi Muhammadiyah juga mengembangkan sayapnya diluar pulau Jawa yaitu Sumatra. Muhammadiyah mulanya masuk di Sumatra Barat, setelah dari itu organisasi ini baru mengembangkan sayapnya ke Aceh. Organisasi Muhammadiyah ini dibawa ke Aceh yaitu pada tahun 1923 oleh seorang karyawan Belanda yang bernama “Djajasoeckarta” yang ditugaskan ke Aceh untuk mengelola Kereta Api yang ada di Aceh,

³² Hasil Observasi dengan Ketua Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 November 2021.

dalam menjalankan tugasnya untuk karyawan Belanda beliau menyebarkan ajaran Muhammadiyah ke Aceh.

Pada mulanya Djajasoekarta tidak berani mendirikan langsung organisasi Muhammadiyah di Aceh karena belum adanya kesiapan yang matang. Pada mulannya Djajasoekarta hanya menyampaikan kepada teman-temannya adalah perkembangan organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Setelah semua persiapan pendirian cabang Muhammadiyah Kutaraja dilengkapi oleh Djajasoekarta dan kawan-kawan, barulah pada tahun 1927 Muhammadiyah secara resmi berdiri di Kutaraja. Persiapan yang dilakukan untuk mendirikan Muhammadiyah di Kutaraja semua dilakukan di rumah Djajasoekarta sendiri, sehingga akhirnya rumah Djajasoekarta diwakafkan kepada Muhammadiyah yang sekarang ini di tanah tersebut berdiri Sekolah Menengah Muhammadiyah.

Setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah di Kutaraja yang pertama sekali masih cabang Muhammadiyah Aceh, yang pertama sekali pengurus banyak dari kalangan pekerja pemerintahan Belanda saja yang merupakan penduduk pendatang dari Minangkabau dan pulau Jawa. Sehingga pada akhir tahun 1932 anggota Muhammadiyah yang ada di Banda Aceh yang terdiri dari 191 orang laki-laki dan 132 orang perempuan. Adapun organisasi Muhammadiyah resmi berdiri pada tahun 1932 berselang 5 tahun dari Muhammadiyah Aceh. Adapun kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banda Aceh ini berada di Jln. Punge Blang

Cut II Lr. Penyantun no. 11, Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, tepatnya berada di dalam kompleks Panti Asuhan Punge Blang Cut.

1) Visi dan Misi Muhammadiyah Kota Banda Aceh

Organisasi Muhammadiyah di Aceh (Kota Banda Aceh) mempunyai visi sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

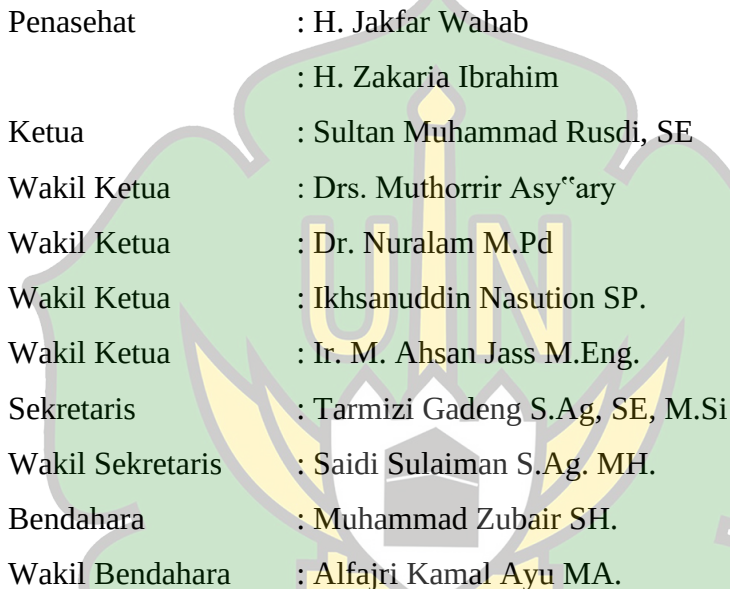
Adapun misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, adalah:

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.

- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.³³

2) Struktur Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh

Susunan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banda Aceh:



Penasehat	: H. Jakfar Wahab
	: H. Zakaria Ibrahim
Ketua	: Sultan Muhammad Rusdi, SE
Wakil Ketua	: Drs. Muthorri Asy'ary
Wakil Ketua	: Dr. Nuralam M.Pd
Wakil Ketua	: Ikhsanuddin Nasution SP.
Wakil Ketua	: Ir. M. Ahsan Jass M.Eng.
Sekretaris	: Tarmizi Gadeng S.Ag, SE, M.Si
Wakil Sekretaris	: Saidi Sulaiman S.Ag. MH.
Bendahara	: Muhammad Zubair SH.
Wakil Bendahara	: Alfajri Kamal Ayu MA.

Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banda Aceh.

a. Majelis Tarjih dan Tajdid

Ketua	: Afrial Hidayat, Lc
Wakil Ketua	: Dr. Amir Khalis, MA
Sekretaris	: Hafizh Akbar, S.Hut.

b. Majelis Tabligh, Pustaka, Informasi dan Dakwah Khusus

Ketua	: Sofnir Rinaldi
-------	------------------

³³ Hasil Observasi dengan Ketua Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 November 2021.

- Wakil Ketua : Drs. H. Raja Radan, MA
Sekretaris : Muhammad Haekal Daudy, SH, MH.
- c. Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Pengembangan Pesantren.
- Ketua : Drs. H. Zakaria Usman.
Wakil Ketua : Jalaluddin Hoessein, MA
Sekretaris : Zulfikar Zulkifli, SE
- d. Majelis Pendidikan Kader, Seni Budaya dan Olah Raga.
- Ketua : Rahmad Julianto
Wakil Ketua : Muhammad Naufal Hidayat, Lc
Sekretaris : Fatarazzikir.
- e. Majelis Pelayanan Sosial
- Ketua : M. Fahriansyah, SE., M.Si
Wakil Ketua : Syarifuddin Idris
Sekretaris : Abrar Muhammad Yus.
- f. Majelis Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
- Ketua : Muhammad Nafis, SE.Ak
Wakil Ketua : Jeliteng Pribadi, SE, MA
Sekretaris : Muhammad Nurdin.
- g. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
- Ketua : dr. Abdul Wahab
Wakil Ketua : Saifuddin Abdul Malik, SKM
Sekretaris : Ghazali, S.Ag
- h. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- Ketua : Ramos, ST
Wakil Ketua : Abdullah Manaf, S.Si

Sekretaris : A. Sakir Walad SKM

i. Lembaga Penanggulangan Bencana (MDMC)

Ketua : Erbi Sanjaya, ST

Wakil Ketua : Muhammad Kamal, ST

Sekretaris : Munandar.³⁴

Setiap Majelis dalam kepemimpinan di organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh memiliki kerja-kerja yang khusus. Adapun fungsi majelis dan lembaga pada pengurus Muhammadiyah Kota Banda adalah sebagai berikut:

a. Majelis Tarjih dan Tajdid

Adapun fungsi dari bidang ini adalah untuk menyampaikan hasil Tarjih kepada warga dan masyarakat mengenai agama Islam, seperti pembahasan tentang akidah, ibadah dan muamalat. Penyampaian ini biasanya disampaikan di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah.

b. Majelis Tabligh, Pustaka, Informasi, dan Dakwah Khusus.

Fungsi dari majelis ini adalah memberikan ceramah kepada masyarakat di setiap mesjid-mesjid, dan juga fungsi dari majelis ini adalah mengirimkan da'i ke mesjid-mesjid yang membutuhkan.

c. Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Pengembangan Pesantren.

Majelis ini berfungsi untuk mendirikan sekolah-sekolah di lingkungan Kota Banda Aceh. Di mulai dari

³⁴ Hasil Observasi dengan Ketua Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 November 2021.

Sekolah Dasar sampai ke sekolah menengah. Adapun sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Banda Aceh.

- 1) SD 1 Muhammadiyah
- 2) SD 2 Muhammadiyah
- 3) SMP Muhammadiyah
- 4) MTS Muhammadiyah
- 5) SMA Muhammadiyah
- 6) SMK Muhammadiyah

d. Majelis Pendidikan Kader

Majelis ini berfungsi untuk membuat pelatihan kepada para anggota Muhammadiyah baik anggota baru ataupun anggota lama. Adapun jenjang pengkaderan biasanya ada dua yaitu latihan pengkaderan untuk pemula dan latihan pengkaderan pengurus.

e. Majelis Pelayanan Sosial

Fungsi dari majelis ini adalah untuk memberikan layanan sosial kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Adapun pelayanan sosial yang telah didirikan oleh organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh adalah Panti Asuhan Muhammadiyah yang berada di Punge Blang Cut.

f. Majelis Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

Kegunaan dari majelis ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kepada masyarakat seperti contohnya mendirikan Baitul Qirat, Klinik dan lain-lain.

g. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.

Majelis ini bertugas untuk menerima wakaf dari masyarakat baik berupa material ataupun non material. Dan majelis ini juga bertugas untuk membuat sertifikasi tanah-tanah wakaf.

h. Majelis Pemberdayaan Masyarakat.

Majelis ini berfungsi untuk membantu masyarakat untuk membuka usaha. Majelis dalam bidang ini bertugas membuat pelatihan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu.

i. Lembaga Penanggulangan Bencana (MDMC)

Lembaga ini adalah memberikan program bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah serta membuat pelatihan suka rela lawan bencana.

B. Program Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh

Adapun program Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:³⁵

1. Program Majelis Tarjih dan Tajdid.

- 1) Meningkatkan pemahaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh.
- 2) Menyusun sistem metodologi pemikiran dan pengamalan Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- 3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam

³⁵ Hasil Observasi dengan Ketua Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 November 2021.

menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.

- 4) Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman pada warga Muhammadiyah keseluruhan lapisan masyarakat.
- 5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian dan informasi bidang tajdid dan pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lainnya.

2. Program Bidang Tabligh, Pustaka, Informasi dan Dakwah Khusus.

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas implementasi proyek dakwah Muhammadiyah, seperti dakwah jamaah, dakwah kultural dan sebagainya, agar kembali berjalan secara efektif.
- 2) Mengintensifkan upaya penyediaan da'i melalui berbagai upaya seperti program Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah.
- 3) Mendirikan dan mengelola pustaka Muhammadiyah di setiap ranting-ranting yang ada di Kota Banda Aceh.
- 4) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam berbagai aspek dan memberikan informasi seputar dakwah kepada masyarakat.

3. Program Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Pengembangan Pesantren.

- 1) Mendorong peningkatan akuntabilitas, profesionalitas, dan transparansi dalam pengelolaan amal usaha bidang pendidikan.
 - 2) Meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah Muhammadiyah di Kota Banda Aceh.
 - 3) Menjadikan sekolah-sekolah Muhammadiyah sekolah yang sesuai dengan kemajuan zaman.
4. Program Pendidikan Kader, Seni Budaya dan Olahraga.
- 1) Meningkatkan pengetahuan kader-kader baru Muhammadiyah.
 - 2) Menjalankan pelatihan kader, untuk menambahnya wawasan kader dalam pengetahuan tentang Muhammadiyah.
 - 3) Meningkatkan anggota Muhammadiyah dalam kesukaran terhadap seni budaya dan olahraga.
5. Program Majelis Pelayanan Sosial.
- 1) Menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana pelayanan prima kepada masyarakat.
 - 2) Meningkatkan mutu dan kualitas panti asuhan Muhammadiyah.
 - 3) Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu.
6. Program Majelis Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

- 1) Meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu dengan memberikan pinjaman modal usaha.
 - 2) Meningkatkan mutu pelayanan Baitul Qirad.
 - 3) Menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mereka.
7. Program Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
- 1) Meningkatkan pelayanan dalam pembuatan sertifikasi tanah wakaf di lingkungan Kota Banda Aceh.
 - 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan tanah mereka.
 - 3) Menerima dan mengsertifikasi tanah yang di wakafkan oleh masyarakat.
8. Program Majelis Pemberdayaan Masyarakat.
- 1) Menjadikan Muhammadiyah sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Membuat pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
 - 3) Membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam segala aspek selagi tidak lari dari garis konteks dakwah Muhammadiyah.
9. Program Lembaga Penanggulangan Bencana.
- 1) Membuat pelatihan kader Muhammadiyah untuk penanggulangan bencana.

- 2) Mengirimkan sukarelawan dan bantuan ke tempat lokasi kejadian.
- 3) Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah.³⁶

C. Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh

1. Tujuan Pengkaderan Muhammadiyah

Tujuan Pengkaderan Muhammadiyah adalah Terbentuknya kader Muhammadiyah yang memiliki ruh (spirit) serta mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan di Persyarikatan, dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa serta konteks global.

2. Arah Pengkaderan Muhammadiyah

Pengkaderan pada hakekatnya merupakan pembinaan personel anggota dan pimpinan secara terprogram dengan tujuan tertentu bagi Persyarikatan. Dalam Muhammadiyah pengkaderan dititikberatkan pada pembinaan ideologi, pembinaan kepemimpinan, membangun kekuatan dan kualitas pelaku gerakan, ideologi gerakan dan mengoptimalkan sistem kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa depan.³⁷ Dengan demikian, pengkaderan Muhammadiyah menjadi upaya penanaman nilai, sikap dan cara berpikir, serta peningkatan kompetensi dan integritas terutama dalam aspek ideologi, kualitas kepemimpinan, ilmu pengetahuan dan wawasan bagi segenap pimpinan, kader dan anggota/warga Muhammadiyah. Dengan kata lain, dalam

³⁶ Hasil Observasi dengan Ketua Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 November 2021.

³⁷ MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016). hlm. 37

pengkaderan harus terjadi penyadaran, peneguhan dan mengayaan. Upaya ini bisa dipahami dalam rincian berikut.

a. Pembinaan Keislaman

- 1) Penanaman nilai-nilai Islam sesuai dengan pandangan Muhammadiyah.
- 2) Pembinaan aqidah.
- 3) Pembinaan ibadah.
- 4) Pembinaan akhlaq.
- 5) Pembinaan mu'amalah duniawiyah.

b. Pembinaan Jiwa Persyarikatan

- 1) Pemahaman sejarah dan dinamika gerakan pembaharuan dan pemikiran Islam dalam konteks memahami Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.
- 2) Meneguhkan ideologi gerakan Muhammadiyah.
- 3) Penguatan etika dan kultur bermuhammadiyah.
- 4) Penguasaan strategi perjuangan Muhammadiyah.

c. Pembinaan Keilmuan dan Wawasan

- 1) Pengembangan penguasaan metodologi keilmuan dan berpikir ilmiah.
- 2) Penguasaan disiplin ilmu dan aplikasi teknologi sesuai bidang keahlian masing-masing.
- 3) Pengembangan wawasan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
- 4) Pemahaman dinamika dan peta perjuangan umat Islam.

d. Pembinaan Kepemimpinan dan Manajemen

- 1) Kemampuan leadership.
- 2) Pemahaman kemampuan manajemen organisasi.

- 3) Penguasaan manajemen gerakan, manajemen ide, kemampuan advokasi dan kemampuan pengambilan keputusan/kebijakan.
 - 4) Kemampuan manajemen pengembangan masyarakat.
 - 5) Pemahaman program Muhammadiyah.
- e. Pembinaan Penguasaan Keterampilan, Informasi dan Keilmuan
- a. Pengembangan potensi diri kader sesuai minat dan bakatnya.
 - b. Pengembangan kecakapan/keahlian dan profesi tertentu seperti kemampuan analisis kebijakan publik, teknik rekayasa sosial, teknik-teknik advokasi dan strategi dakwah.
 - c. Pengembangan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi, jaringan media, internet dan komputer dalam kajian dari situasi agama serta analisis data untuk keperluan dakwah Islam.

3. Jenis dan Bentuk Pengkaderan Muhammadiyah

Pengkaderan Muhammadiyah dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis kegiatan kaderisasi yang terarah, terencana dan berkesinambungan. Jenis-jenis kegiatan kaderisasi yang dapat dilaksanakan secara umum terdiri dari dua kategori:

a. Pengkaderan Utama

Merupakan kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta sistem

dan aksi gerakan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Majelis Pendidikan Kader (Pusat sampai Cabang) dan Amal Usaha Muhammadiyah. Kaderisasi yang termasuk kategori pengkaderan utama adalah Darul Arqam dan Baitul Arqam.

1) Darul Arqam

Darul Arqam merupakan bentuk kegiatan kaderisasi yang utama dan khas dalam Sistem Pengkaderan Muhammadiyah yang bertujuan untuk membentuk sistem cara berpikir dan sikap kader dan pemimpin yang kritis, terbuka dan penuh komitmen terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Adapun materi dalam darul arqam terdiri dari lima kelompok materi dan terbagi menjadi dua jenjang yaitu wilayah dan pusat. empat kelompok materi merupakan materi wajib dan di tingkat wilayah diberi peluang untuk menambah dengan muatan lokal.

2) Baitul Arqam

Baitul Arqam merupakan modifikasi dan penyederhanaan dari Darul Arqam yang diselenggarakan untuk tingkat pimpinan ranting, serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Sasarannya simpatisan, anggota, pimpinan Muhammadiyah, dan

pimpinan (middle manager ke bawah) serta karyawan Amal Usaha Muhammadiyah.³⁸

b. Pengkaderan Fungsional

Merupakan kegiatan kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus atau kajian intensif yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi tertentu dari suatu majelis atau lembaga. Pengkaderan fungsional merupakan pendukung dari pengkaderan utama dan berfungsi untuk pengembangan sumberdaya kader. Pengkaderan ini lebih fleksibel mengingat prinsip penyelenggaraannya yang desentralistik-otonomis-sistemik. Contohnya:

1) Sekolah Kader

Sekolah Kader merupakan suatu lembaga pendidikan formal di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kriteria dan tujuan khusus serta program secara resmi sebagai tempat pendidikan kader (pelajar dan mahasiswa). Ketentuan untuk penetapan dan pendirian sekolah kader hanya bisa dilakukan atas dasar rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.³⁹

2) Pelatihan Instruktur

Merupakan salah satu bentuk kegiatan kaderisasi pendukung yang dilakukan untuk meningkatkan

³⁸ MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016). hlm. 57-58

³⁹ MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016). hlm. 59

kemampuan kader Muhammadiyah sebagai pelatih (instruktur) dalam mengelola dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan kaderisasi di persyarikatan Muhammadiyah.

3) Dialog Indeopolitor

Dialog Indeopolitor (ideologi, politik dan organisasi) merupakan kaderisasi bagi pemimpin persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didesain dalam bentuk dialog dengan panelis dan diskusi dengan sesama peserta dalam bentuk dinamika kelompok untuk memberikan pemahaman bagi kader dan pemimpin organisasi Muhammadiyah tentang peta mutakhir ideologi politik-ekonomi dan gerakan keagamaan yang berkembang di Indonesia, baik skala dalam maupun regional dan nasional.⁴⁰

4) Pelatihan yang diselenggarakan oleh Majelis dan Lembaga

Pelatihan-pelatihan di lingkungan Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah ini antara lain: pelatihan pembantu kader hisab dan falak (Majelis Tarjih dan Tajdid), pelatihan kader Mubaligh (Majelis Tablig), dan berbagai bentuk pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh majelis dan lembaga.

5) Pengajian Pimpinan

⁴⁰ MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016). hlm. 60

Merupakan pengajian terbatas bagi pengembangan wawasan dan pendalaman nilai-nilai ideologi gerakan Muhammadiyah yang diikuti oleh pimpinan persyarikatan, pimpinan ortom dan pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) serta ditambah kalangan tertentu yang dipandang perlu warga atau tokoh Muhammadiyah.

6) Pengajian Khusus

Bentuk pengajian ini dirancang dan diselenggarakan secara khusus sebagai media internalisasi dan peneguhan paham agama dan ideologi gerakan Muhammadiyah bagi setiap warga persyarikatan di lingkungan masing-masing.⁴¹

7) Pelatihan Tata Kelola Organisasi/Upgrading

Pelatihan ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kemampuan manajerial dan administratif bagi pimpinan persyarikatan serta pengelola Amal Usaha Muhammadiyah agar dapat menjalankan amanah kepemimpinan dan pengelola secara professional dan dinamis dengan tetap berpijak pada visi dan misi Muhammadiyah.

8) Diklat Khusus

Pendidikan dan pelatihan ini berorientasi pada pengembangan sumberdaya kader dan pemekaran potensinya sehingga bisa mendukung peran kader di

⁴¹ MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016). hlm. 61-62

luar persyarikatan dan menjadi pintu masuk bagi simpatisan dan calon kader Muhammadiyah. Seperti, diktat Jurnalistik, pelatihan pengembangan kapasitas kecerdasan emosional dan spiritual, diklat kepemimpinan, dan Out Bound Training.⁴²

4. Jenjang Pengkaderan Muhammadiyah

Adapun jenjang pengkaderan ini dilaksanakan sesuai dengan jenjang struktur pimpinan Muhammadiyah dengan penanggungjawab kegiatan adalah Majelis Pendidikan Kader ditingkatnya masing-masing.

a. Latihan Kader Muballigh (LKM)

Menitik beratkan pada pembinaan segi penguasaan materi, metode dan wawasan dakwah serta penguatan komitmen Mubaligh, sehingga mampu menggerakkan umat mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Latihan Kader Muballigh dilaksanakan dengan Jenjang :

- 1) LKM Tingkat Cabang, dilaksanakan oleh MTDK PCM untuk ranting – ranting, (bisa dilaksanakan oleh gabungan beberapa PCM).
- 2) LKM Tingkat Daerah, dilaksanakan oleh MTDK PDM untuk cabang – cabang, (bisa dilaksanakan oleh gabungan beberapa PDM).

⁴² MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016). hlm. 62

3) LKM Tingkat Wilayah, dilaksanakan oleh MTDK PWM untuk daerah – daerah, (bisa dilaksanakan oleh gabungan beberapa PWM).

b. Pelatihan Instruktur Mubaligh (LIM)

Menitikberatkan pada pembinaan segi kepemimpinan dan ketrampilan melaksanakan pelatihan kader Mubaligh sesuai dengan tingkatan kepempinan. Latihan Instruktur Muballigh dilaksanakan dengan jenjang:

- 1) LIM Tingkat Daerah, dilaksanakan oleh MTDK PDM untuk cabang-cabang, (bisa dilaksanakan oleh gabungan beberapa PDM).
- 2) LIM Tingkat Wilayah, dilaksanakan oleh MTDK PWM untuk daerah-daerah, (bisa dilaksanakan oleh gabungan beberapa PWM).
- 3) LIM Tingkat Nasional, dilaksanakan oleh MTDK PPM untuk wilayah-wilayah dan Ortom Tingkat Pusat.

c. Refreshing Mubaligh

Menitikberatkan pada pemberian bahan-bahan mutakhir dan bahan khusus yang diperlukan oleh pada Muballigh dan da'i Muhammadiyah, sesuai dengan tingkatan masing-masing, seperti kajian kristologi dan kristenisasi, kajian tentang ghazwul fikri dan sebagainya, sesuai dengan tingkat kepemimpinan masing-masing.

d. Pelatihan Khusus

Menitikberatkan pada penambahan dan pendalaman materi, strategi dan metode dakwah yang bersifat khusus,

seperti pelatihan bagi da'i Khusus yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

e. **Pengajian Pimpinan**

Kegiatan ini sebagai pembinaan rutin pimpinan dan mubaligh Muhammadiyah sekaligus pengayaan wawasan dan forum berbagi pengalaman, problem solving dan kajian isu-isu penting yang bersifat cepat dan perlu menjadi perhatian para Mubaligh dan Pimpinan Persyarikatan di masing-masing tingkat.

f. **Sekolah Kader Muballigh**

Seperti menyelenggarakan Madrasah Muballighin, Pesantren Kader Tabligh, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah atau menyusun kurikulum pendidikan Muballigh untuk dimasukkan ke dalam Madrasah, Pesantren, Sekolah, Perguruan Tinggi (khususnya Fakultas Agama Islam) dan Ma'had Bahasa Arab dan Studi Islam yang ada di lingkungan Muhammadiyah, dan Pesantren Perguruan Tinggi, seperti Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran.⁴³

5. Pengorganisasian Kader Muhammadiyah

Ada 2 cara strategi Pengorganisasian Kader Muhammadiyah yaitu secara internal dan eksternal, antara lain sebagai berikut:

⁴³<https://aanborneo.blogspot.com/2012/07/pengkaderanmuhammadiyah.html>. diakses pada tanggal 26 November 2021.

- a. Rekrutmen internal yaitu melakukan pemantapan pemahaman ideologi Muhammadiyah di kalangan teman-teman, saudara, dan anggota keluarga sendiri.
- b. Rekrutmen eksternal yaitu melakukan perluasan-perluasan akses ke wilayah-wilayah yang dianggap memiliki potensi sumber daya manusia. Khusus rekrutmen ini, rekrutmen dilakukan dengan keterbukaan, transparansi dan selektif.

D. Pandangan Pengurus Terhadap Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh

Sebagai sebuah sistem dan kesatuan yang utuh, maka sistem pengkaderan Muhammadiyah berlaku bagi semua jajaran dan komponen Persyarikatan. Konsekuensinya sistem pengkaderan Muhammadiyah juga memuat atau mencakup seluruh bentuk dan jenis kaderisasi dan pelatihan yang diterapkan di Muhammadiyah, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan vertikal adalah sistem pengkaderan Muhammadiyah berlaku bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah, mulai dari Pusat sampai dengan Ranting, sebagai acuan dan pola dalam pelaksanaan kaderisasi secara optimal sesuai dengan tingkatan masing-masing.⁴⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak SL selaku ketua organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Sistem pengkaderan adalah sebuah sistem yang terstruktur, yang dibuat dari pusat (Pimpinan Pusat Muhammadiyah), provinsi (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah), kabupaten (Pimpinan Daerah Muhammadiyah), kecamatan (Pimpinan

⁴⁴<https://aanborneo.blogspot.com/2012/07/pengkaderanmuhammadiyah.html>. diakses pada tanggal 26 November 2021.

Cabang Muhammadiyah) dan seterusnya, sistem pengkaderan ini memiliki sistem pengkaderan yang sama. Tujuan Pengkaderan Muhammadiyah adalah untuk menciptakan sumberdaya (kader), karena kader adalah penerus suatu organisasi atau persyarikatan dimasa yang akan datang. Dalam istilah organisasi Muhammadiyah kader adalah sebagai pelopor, pelangsup dan penyempurna Amal Usaha Muhammadiyah. Kader ini disiapkan untuk mengisi struktur, karena dalam sebuah organisasi akan membutuhkan pimpinan, anggota dan lain sebagainya. Kegiatan seperti itu berlangsung sejak Muhammadiyah berdiri, dan akan ada pergantian pengurus pada waktu ke waktu. Dalam menjalankan organisasi memerlukan kader untuk mengisi atau menjalankan amanah di dalam struktur”.⁴⁵

Hal senada juga disampaikan oleh bapak SH selaku pengurus organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

Pengkaderan di Muhammadiyah ada beberapa tingkatan, dimulai dari IPM dan IMM memiliki pengkaderan tersendiri, pemuda Muhammadiyah juga memiliki pengkaderan tersendiri, dan juga NA (seangkatan pemuda Muhammadiyah khusus perempuan) juga memiliki pengkaderan tersendiri. Pada dasarnya pengkaderan yang dilakukan oleh ortom Muhammadiyah itu sama yaitu menanamkan ideologi Muhammadiyah, hanya terdapat sedikit perbedaan dalam pengkaderan yaitu terletak pada manajemen organisasi. Setelah mengikuti pengkaderan di Muhammadiyah akan diberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah yang langsung dikeluarkan oleh pimpinan pusat. Tujuan pengkaderan Muhammadiyah adalah menanamkan nilai-nilai islam dan juga ideologi Muhammadiyah, dan bukan semata-mata menjadi kader

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak SL Ketua Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

Muhammadiyah hanya mengejar keinginan pribadi seperti mau buka usaha, mau menjadi dosen dan hal-hal lainnya. Ini menjadi salah satu bentuk atau niat menjadi kader Muhammadiyah.⁴⁶

Dalam kesatuan sistem, maka pelaksanaan pengkaderan, baik di lingkungan Unsur pembantu pimpinan, ortom, maupun AUM harus selalu dalam koordinasi dengan Majelis Pendidikan Kader (MPK) di masing-masing tingkatan pimpinan persyarikatan. Untuk efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengkaderan, pimpinan AUM (bersama majlis/ lembaga yang membawahnya) berkoordinasi langsung dengan MPK. Sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada MPK, maka hal ini menjadi bagian dari fungsi MPK dalam pengkaderan.

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak TR selaku sekretaris organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Sistem pengkaderan merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas dan memiliki pedoman-pedoman pokok. Dari penerapan sistem pengkaderan ini mengharapkan hasil yang cukup maksimal sehingga organisasi Muhammadiyah memiliki generasi penerus dalam memperjuangkan tujuannya.”⁴⁷

Ini menunjukkan bahwa sistem pengkaderan adalah hal yang kompleks dan juga saling keterikatan antara satu jenjang dengan jenjang lainnya. Hal ini juga ditambahkan oleh bapak SM selaku

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak SH pengurus Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak TR Sekretaris Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 November 2021

pengurus organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

Sistem pengkaderan organisasi Muhammadiyah ini dilihat dari beberapa segi, salah satunya adalah pengkaderan yang resmi, contohnya seperti pengkaderan baitul arqam, pengkaderan baitul arqam ini mempunyai tim sendiri yang memberikan pengkaderan, timnya seperti TOT (*Training Of Trainer*) ada pengkaderan untuk trainer, dalam pengkaderan itu ada beberapa hal yang diberikan, salah satunya tentang organisasi Muhammadiyah yang dilihat dari aspek historis dan aspek ideologi seperti keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, identitas Muhammadiyah, paham agama di Muhammadiyah dan sebagainya, selanjutnya dilihat dari aspek organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Memberi pemahaman kepada calon kader tentang doktrin Muhammadiyah, bahwa setiap kader Muhammadiyah harus ikhlas beramal, artinya tujuan pengkaderan ini adalah ingin menguatkan individu kader Muhammadiyah dan komitmen Muhammadiyahnya⁴⁸

Oleh sebab itu dalam organisasi Muhammadiyah sistem pengkaderan selalu memiliki jenjang tersendiri dari tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi. Pendidikan kader Muhammadiyah difokuskan pada agenda peneguhan ideologi dan pengembangan sumber daya kader. Hal ini disebabkan banyak persoalan yang erat kaitannya dengan intervensi ideologis dari partai-partai maupun gerakan Islam lain pada tubuh persyarikatan, amal usaha, dan organisasi otonom Muhammadiyah.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan apak SM pengurus organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 18 November 2021.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang berhasil dalam pengelolaan pengkaderan. Organisasi ini dipandang mampu melakukan pendefinisian peran dalam perjalanan organisasi yang senantiasa mengikuti perkembangan keadaan zaman. Oleh karena itu, perkembangan internal yang terjadi dalam organisasi ini dalam pengelolaan pengkaderan Islam amat menarik untuk dijadikan sebagai fokus perhatian. Pada awal rintisanpun Muhammadiyah telah mengambil langkah strategis dengan bentuk nyata dan permanen, yakni dengan mengadakan pendidikan kader dalam lembaga formal yang diharapkan mampu menjadi anak panah Muhammadiyah yang ketika dilepas dari busurnya akan dapat mengenai sasaran dan dapat memberikan warna pada sasaran yang dituju.⁴⁹

Pengkaderan dalam Muhammadiyah dilakukan dalam dua kategori, yakni pengkaderan utama dan pengkaderan fungsional⁵⁰ yaitu:

1. Pengkaderan utama

ialah kegiatan kaderisasi pokok yang dilakukan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta aksi gerakan. Pengkaderan ini dilaksanakan dengan standar kurikulum yang baku dan waktu penyelenggaraannya dalam satuan

⁴⁹ M Yusron Asrofie. *Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Kepemimpinannya*. (Yogyakarta: Yogyakarta Offset, 1983), hal. 51-56.

⁵⁰ Tim Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah. *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*. (Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah), hal. 44-45.

waktu tertentu yang telah ditetapkan. Contoh pengkaderan utama adalah Darul Arqam dan Baitul Arqam

2. Pengkaderan fungsional

Dilaksanakan sebagai pendukung pengkaderan utama dan guna pengembangan sumber daya kader. Pengkaderan fungsional tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku karena dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dan fungsi tertentu dari satuan organisasi. Contoh bentuk kegiatannya antara lain dengan melalui ekstra kurikuler di sekolah, pelatihan instruktur, diklat khusus, pengajian dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kreatifitas masing-masing penyelenggara.

Adapun faktor pendukung dan penghambat pengkaderan Muhammadiyah antara lain sebagai berikut:⁵¹

1. Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

- a. Sejarah Muhammadiyah yang memang sejak awal berdiri diarahkan ke ranah keilmuan.
- b. Kondisi dan *Background* Komisariat yang memiliki kebiasaan mengadakan diskusi-diskusi yang mengarah keintelektualan.
- c. Visi dan Misi serta orientasi Muhammadiyah selalu diarahkan ke ranah keilmuan.

⁵¹ Lestari, M. D. (2017). Pengkaderan Intelektual Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Tajdida*, 15 (1), 38-48.

- d. Sebagian besar individu dari pimpinan dan kader memiliki semangat lebih untuk mendalami keilmuan.

2) Faktor Eksternal

- a. Dukungan dari demisioner dan Lembaga Institusi lainnya yang memberikan spirit dalam melaksanakan pengkaderan intelektual.
- b. Adanya kepercayaan dari Pimpinan

2. Faktor Penghambat

- a. Dari segi pelaksana kurang konsistennya panitia terhadap jobdisk yang menjadi amanahnya. Sehingga mempengaruhi konsep yang sudah disusun rapi kurang terlaksana dengan baik.
- b. Masih ada pimpinan ataupun kader yang kurang minat dalam bidang keilmuan, sehingga target semua pimpinan dan kader menguasai keilmuan dengan baik belum sepenuhnya terlaksana.
- c. Kendala keuangan menjadi hal yang belum terpecahkan.

Dalam pengkaderan hendaknya lebih memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses pengkaderan dan juga mematangkan konsep pengkaderan Muhammadiyah baik dari segi konsep materi, output kader dan rencana tindak lanjut dari pengkaderan Muhammadiyah. Hal serupa juga disampaikan oleh Pengurus Muhammadiyah Kota Banda Aceh terkait faktor pendukung dan penghambat pengkaderan dalam wawancaranya yaitu:

Faktor penghambat pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh saat ini yaitu masih banyak orang yang berpikir Muhammadiyah sebagai sebuah aliran. Jadi masih banyak orang-orang yang belum kenal dengan Muhammadiyah. Adapun faktor pendukung pengkaderan Muhammadiyah antara lain karena Muhammadiyah adalah organisasi besar yang memiliki sekolah, universitas bahkan rumah sakit. Sehingga ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi besar.⁵²

Ibu An juga menambahkan bahwa:

Faktor penghambat pengkaderan Muhammadiyah Kota Banda Aceh untuk saat ini tidak ada kendala dan hambatan, jika semua anggota bergerak sesuai jobdesnya masing-masing. Adapun faktor pendukung pengkaderan Muhammadiyah salah satunya adalah para organisasi otonom yang mendukung setiap kegiatan. Kuncinya adalah harus adanya kesamaan perasaan dan pikiran untuk memajukan pengkaderan Muhammadiyah.

Sistem Pengkaderan dalam Muhammadiyah yaitu seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah. Pengkaderan merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Pengkaderan adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas maka sebuah organisasi perlu merancang cara yang sistematis untuk mendapatkan kader yang *qualified*. Sistem pengkaderan merupakan pedoman dalam menjalankan sebuah

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak SL Ketua Organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2021.

pengkaderan, baik secara formal maupun secara non formal. Sebuah perangkat yang tersusun secara runtut, terarah, detail dalam rangka mengasuh dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap kader.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak MH selaku pengurus organisasi Muhammadiyah Kota Banda Aceh mengatakan bahwa:

Dalam pengkaderan Muhammadiyah tidak memiliki hambatan yang ada hanya dinamika. Karena dalam pengkaderan terjadi dialog, oleh sebab itu yang ada adalah dinamika. Ada sebagian orang yang tidak tahu Muhammadiyah namun ia ingin tahu tentang Muhammadiyah. Ada sebagian orang tidak tahu Muhammadiyah namun punya persepsi jelek terhadap Muhammadiyah. Tapi yang jelas kader-kader Muhammadiyah harus disiapkan, pertama karena mereka akan menjadi penerus dan pelangsong Muhammadiyah dalam menjalankan semua lembaga, usaha dan semua hal terkait Muhammadiyah.

Pentingnya dunia pengkaderan dalam menanamkan idealisme Muhammadiyah bagi kader penerus perjuangan yang pasti akan diwariskan kepada kader penerus. Oleh karena itu, jenjang pengkaderan yang ada disetiap organisasi Muhammadiyah memiliki makna dan menjadi penting. Sebab di dalamnya, akan ditransformasikan nilai-nilai keunggulan dan kebajikan kepada generasi mendatang, yang akan mengemban cita-cita idealisme Persyarikatan Muhammadiyah.

F. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Muhammadiyah sebagai sebuah sistem dan kesatuan yang utuh, maka SPM (Sistem Pengkaderan Muhammadiyah) pengkaderan berlaku bagi semua jajaran dan komponen Persyarikatan. Konsekkuensinya SPM juga memuat atau mencakup seluruh bentuk dan jenis kaderisasi dan pelatihan yang diterapkan di Muhammadiyah, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan vertikal adalah SPM berlaku bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah, mulai dari Pusat sampai dengan Ranting, sebagai acuan dan pola dalam pelaksanaan kadersisari secara optimal sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan horizontal adalah SPM berlaku dan mengikat seluruh Unsur Pembantu Pimpinan (majlis dan lembaga), Ortom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diseluruh jenjang kepemimpinan Muhammadiyah untuk dilaksanakan sebagai acuan dan pola kaderisasi. Karena bersifat mengikat dan menyeluruh seperti itu, maka sistem pengkaderan yang dimiliki masing-masing ortom menjadi bagian dari SPM. Masing-masing ortom melaksanakan program dan kegiatan pengkaderanya berdasarkan kekhasan masing-masing dengan tetap mengacu dan mengindahkan konsep dasar, prinsip dan kurikulum dalam SPM secara konsisten. Sedangkan pelatihan dan training yang ada dan dimiliki oleh majlis dan/atau lembaga semuanya termasuk dalam SPM yang dikatagorikan sebagai jenis pengkaderan fungsional.

Karena termasuk bagian SPM, maka dalam pengkaderan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh ortom dan majlis atau lembaga tersebut harus mengandung muatan materi pokok dari kurikulum SPM.

Kemudian, sebagai bagian dari SPM, maka untuk kegiatan pelatihan atau training dalam program kegiatan yang diselenggarakan oleh unsur pembantu pimpinan, masing-masing cukup menyusun panduan pelatihan atau pedoman pelaksanaan saja. Jadi tidak perlu membuat sistem pengkaderan sendiri, untuk menghindari kesalahpahaman ada lebih dari satu sistem pengkaderan Muhammadiyah. Dalam kesatuan sistem, maka pelaksanaan pengkaderan, baik di lingkungan Unsur pembantu pimpinan, ortom, maupun AUM harus selalu dalam koordinasi dengan Majelis Pendidikan Kader (MPK) di masing-masing tingkatan pimpinan persyarikatan. Untuk efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengkaderan, pimpinan AUM (bersama majlis/lembaga yang membawahnya) berkoordinasi langsung dengan MPK. Sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada MPK, maka hal ini menjadi bagian dari fungsi MPK dalam pengkaderan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, dapat diambil sebagai berikut:

1. Sistem pengkaderan merupakan suatu sistem yang terstruktur dan berjenjang, memiliki arah dan tujuan yang jelas dan memiliki pedoman-pedoman pokok yang dibuat dari pusat (Pimpinan Pusat Muhammadiyah), provinsi (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah), kabupaten (Pimpinan Daerah Muhammadiyah), kecamatan (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) dan seterusnya, sistem pengkaderan ini memiliki sistem pengkaderan yang sama. Tujuan Pengkaderan Muhammadiyah adalah untuk menciptakan sumberdaya (kader), karena kader adalah penerus suatu organisasi atau persyarikatan dimasa yang akan datang. Dalam istilah organisasi Muhammadiyah kader adalah sebagai pelopor, pelangsup dan penyempurna Amal Usaha Muhammadiyah. Kader ini disiapkan untuk mengisi struktur, karena dalam sebuah organisasi akan membutuhkan pimpinan, anggota dan lain sebagainya. Kegiatan seperti itu berlangsung sejak Muhammadiyah berdiri, dan akan ada pergantian pengurus pada waktu ke waktu.
2. Faktor Pendukung sistem pengkaderan Muhammadiyah dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Faktor Internal: (a) Sejarah

Muhammadiyah; (b) Kondisi dan *Background* Komisariat; (c) Visi dan Misi serta orientasi Muhammadiyah. (2) Faktor Eksternal: (a) Dukungan dari demisioner dan Lembaga Institusi lainnya; (b) Adanya kepercayaan dari Pimpinan. Adapun Faktor Penghambat sistem pengkaderan Muhammadiyah (a) kurang konsistennya panitia terhadap jobdisk yang menjadi amanahnya; (b) Masih ada pimpinan ataupun kader yang kurang minat dalam bidang keilmuan; (c) Kendala keuangan menjadi hal yang belum terpecahkan.

B. Saran

Saran-saran penulis berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Pengurus Muhammadiyah agar lebih memperhatikan sistem pengkaderan Muhammadiyah.
2. Diharapkan kepada panitia pelaksana pengkaderan Muhammadiyah agar lebih kompeten dalam pelaksanaan pengkaderan.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam lagi mengenai sistem pengkaderan Muhammadiyah dan menutupi atau melaksanakan apa saja yang terdapat kekurangan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Purnama Bahtiar. *Membaca Ulang Dinamika Muhammadiyah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2004
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- <https://aanborneo.blogspot.com/2012/07/pengkaderanmuhammadiyah.html>. diakses pada tanggal 26 November 2021.
- <https://aanborneo.blogspot.com/2012/07/pengkaderanmuhammadiyah.html>. diakses pada tanggal 26 November 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh#cite_note-7. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
- <https://kbbi.lektur.id/pengkaderan.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 10.32 WIB.
- <https://jagokata.com/arti-kata/organisasi.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.
- <https://jagokata.com/arti-kata/kota.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 12.00 WIB.
- Jamaluddin, A. N, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017).
- Lestari, M. D. (2017). Pengkaderan Intelektual Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Tajdida*, 15 (1), 38-48.
- Lexi J Moleoang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 11.

_____, *Metode Penelitian Kualitatif “Edisi Revisi”*
(Bandung: RemajaRosdakarya, 2010), hal. 219

M Darson Hamid, M. Yusron Asrofie dkk, *Kader Persyarikatan dalam Persoalan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2002).

M Yusron Asrofie. *Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Kepemimpinannya*. (Yogyakarta: Yogyakarta Ofset, 1983).

Mappanyompa dan Imawanto. (2019). Problematika Pengkaderan Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram Dalam Persepektif Norma Pengkaderan Muhammadiyah. *jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1).

Mardani, “*Manajemen Pendidikan Kader Muhammadiyah Dalam Pembentukan Akhlak Siswa (Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta dan SMK Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 2016/2017)*”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Moch. Taufiq Ridho. “*Sistem Pengkaderan Berorganisasi Santri (Studi Kasus di Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah)*”, dalam jurnal PP Vol.1, No.2, (2011).

MPK PP Muhammadiyah, *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta, MPK PP Muhammadiyah, 2016).

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Nana Sudjana. Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995).

Ridwan Furqoni, “*Sistem Pengkaderan Muhammadiyah Sebagai Sistem Penyiapan Kader Muhammadiyah*”, (Tesis Pemikiran Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

Robbins, Stephen P.. (1994), *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi* / Stephen P. Robbins, Jusuf Udaya (alih bahasa), (ke-3 cet : l.) jakarta : Arcan.

Rusdin Pohan, *Metodelogi Penelitian*, (Aceh: Ar-Rigal Institut, 2007).

Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Syeikh Shafiyyurahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1997).

Tanjung Lihayati, “*Peran Sekolah Sebagai Media Kaderisasi Muhammadiyah (Studi Kasus di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta)*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Tim Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah. *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*. (Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah).

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Muharrir



Wawancara dengan Bapak Sumarlin



Wawancara dengan Ibu Linda



Wawancara dengan Bapak Muharrir



Wawancara dengan Bapak Tarmizi



Wawancara dengan Bapak Hendra